Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	2

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Balap Formula E yang Timbulkan Polemik

PERHELATAN balap mobil bergengsi Formula E menjadi salah satu kejutan yang disuguhkan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, kegiatan itu menjadi yang pertama kali diadakan di Indonesia. Penggemar balap mobil listrik dunia juga sedang rindu, setelah 15 tahun tak pernah digelar.

Namun, perhelatan yang diinisiasi oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan, ternyata menimbulkan polemik berkepanjangan. Karena untuk menggelar acara itu, pemerintah harus terlebih dahulu membangun sirkuit. Hingga akhirnya disiapkan di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Penyelenggaraan balap mobil listrik ini menjadi polemik, lantaran Pemprov DKI mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 560 miliar, untuk pembayaran komitmen. Padahal, untuk pembangunan sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) yang dikerjakan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Pemprov sudah harus mengeluarkan Rp190 miliar.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri memastikan biaya tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan Formula E selama tiga musim, sesuai kontrak perjanjian, yakni tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Setelahnya, Pemprov DKI menjamin tidak akan menggunakan lagi anggaran daerah namun dengan skema business to business.

Sejumlah anggota DPRD DKI yang dimotori fraksi PDIP dan PSI, pun bereaksi keras. Mereka menuding, ratusan miliar rupiah dari APBD itu digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Mereka pun mengusulkan Interpelasi Formula E. Namun tujuh fraksi DPRD DKI penolak interpelasi. Mereka justru melaporkan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, ke Badan Kehormatan (BK) dewan.

Setelah balap Formula E digelar, polemik tak otomatis selesai. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuding Pemprov DKI tidak jelas dalam memberi penjelasan audit keuangan Formua E. Pasalnya, hingga saat ini mereka tak kunjung mempublikasikan mengenai pembiayaan Formula E.

Bahkan, Gubernur Anies Baswedan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies pun telah menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi.

Balapan Sukses

Meski menimbulkan polemik, namun balap mobil listrik itu tetap digelar di Ancol. Sempat beredar kabar bahwa di ajang bergengsi itu tak ada sponsornya. Namun, hal ini dibantah Ketua Panitia Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni. Ia mengatakan, setidaknya terdapat tujuh perusahaan dalam negeri yang meneken kerja sama untuk menjadi sponsor perhelatan balap mobil ramah lingkungan tersebut.

Sahroni menyebut, tujuh perusahaan dalam negeri tersebut yaitu retailer gawai Erafone, Bank Arta Graha Internasional, Hotel Discovery Ancol, Gulavit, Electronic City, Paprika, dan MS Glow for Men. Ia mengklaim, dari tujuh sponsor tersebut nilainya mencapai Rp100 miliar.

Balap Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu, pun dinilai sukses. Karena memecahkan rekor penonton terbanyak. Jumlah penonton, baik langsung maupun melalui televisi, diklaim mencapai 10 juta orang. Ini menjadi balap Formula E dengan penonton siaran tertinggi di dunia.

Namun dewan DKI menilai, klaim sukses tersebut belum memiliki parameter yang jelas. Pasalnya, gelaran balap tersebut terkesan dipaksakan sukses.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, terus menagih laporan keuangan penyelenggaraan Formula E kepada PT Jakpro. Sampai akhirnya JakPro buka-bukaan. Secara keseluruhan, BUMD DKI ini menyebut memperoleh laba bersih sebesar Rp 6,41 miliar.

Direktur JakPro, Gunung Kartiko, dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/11), merincikan pendapatan usaha yang didapatkan sebesar Rp137,34 miliar. Kemudian beban pokok pendapatan adalah Rp129,5 miliar.

Lalu beban administrasi umum Rp1,89 miliar, pendapatan lain-lain Rp2,1 miliar, dan beban pajak final Rp1,56 miliar. Sehingga kalau dilihat masih ada positif sebesar kurang lebih Rp6,41 miliar.

Meski begitu, Gunung mengakui pihaknya memiliki utang sebesar Rp20 miliar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Namun saat ini utang yang tersisa tinggal Rp4,9 miliar, dan akan dibayarkan melalui pembangunan infrastruktur. **(Ifand)**